

INTEGRASI STRATEGIS PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI DALAM KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERSONALISASI PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Ni Kadek Depi Dumaini¹, Gusti Ayu Nanik Ardhiani²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Agama Hindu Amlapura,
1depidumaini@gmail.com, 2naniekardhiani@gmail.com,

ABSTRACT

This research analyzes the synchronization of differentiated learning strategies within the School Operational Curriculum (KOSP) at the elementary school level to support educational personalization. Although Kurikulum Merdeka offers high flexibility, its implementation often remains trapped in administrative formalities. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach, collecting data through in-depth interviews with principals and teachers, as well as KOSP documentation analysis. The results reveal a "decoupling" phenomenon, where KOSP documents integrate differentiated strategies only at a textual-macro level without reaching technical operational aspects. Currently, the KOSP provides only passive support and fails to offer legal protection for teachers to perform adaptive instructional innovations. Low managerial coherence and one-way communication between curriculum developers and practitioners act as the primary barriers. To synchronize these policies, this study proposes activating professional learning communities to reposition teachers as curriculum co-developers based on diagnostic assessment data. Ultimately, this transformation redefines the KOSP from a mere administrative artifact into a responsive managerial instrument that addresses student heterogeneity to achieve substantive educational equity.

Keywords: KOSP, Differentiated Learning, Educational Personalization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada jenjang sekolah dasar sebagai upaya personalisasi pendidikan. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas tinggi, namun implementasinya di tingkat satuan pendidikan sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala sekolah dan guru, serta studi dokumentasi KOSP. Hasil penelitian mengungkap adanya fenomena decoupling, di mana integrasi strategi berdiferensiasi dalam dokumen KOSP masih bersifat tekstual-makro dan belum menyentuh aspek teknis operasional. KOSP saat ini baru memberikan dukungan pasif yang belum mampu memberikan proteksi legal bagi guru dalam melakukan inovasi instruksional yang adaptif. Hambatan utama ditemukan pada rendahnya koherensi manajerial dan pola komunikasi satu arah antara tim pengembang kurikulum dan praktisi kelas. Sebagai langkah sinkronisasi, penelitian ini menawarkan solusi melalui pengaktifan komunitas praktisi di sekolah untuk mereposisi peran guru sebagai penyusun bersama kurikulum berbasis data asesmen diagnostik. Dengan demikian, KOSP dapat bertransformasi dari sekadar

artefak administratif menjadi instrumen manajerial yang responsif terhadap heterogenitas peserta didik guna mewujudkan keadilan pendidikan yang substantif.

Kata Kunci: KOSP, Pembelajaran Berdiferensiasi, Personalisasi Pendidikan.

A. Pendahuluan

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini tengah melewati masa transisi penting melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang menawarkan fleksibilitas tinggi. Langkah ini diambil pemerintah sebagai respons konkret untuk menjawab persoalan serius terkait krisis pembelajaran (*learning crisis*), yang menuntut perubahan drastis dari sistem pembelajaran kaku menuju pola yang lebih berorientasi pada kebutuhan murid. Pada intinya, satuan pendidikan kini memiliki keleluasaan penuh untuk menciptakan ekosistem belajar yang relevan dengan dinamika zaman. Sayangnya, keberhasilan visi ini di tingkat lapangan sangat bergantung pada sejauh mana manajemen sekolah mampu menyusun dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang benar-benar membumi dan aplikatif, bukan sekadar salinan administratif dari kebijakan pusat (Wulandari & Surani, 2023).

Realitas di sekolah dasar memperlihatkan tantangan yang

kompleks berupa heterogenitas siswa yang sangat tinggi, mulai dari perbedaan tingkat pemahaman, minat, hingga gaya belajar yang beragam. Untuk menyikapi perbedaan tersebut, pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai instrumen kunci yang menawarkan keluwesan dalam penyampaian materi, proses interaksi, hingga evaluasi hasil belajar. Upaya memanusiakan pendidikan melalui strategi diferensiasi ini merupakan langkah krusial guna memastikan setiap anak mendapatkan perlakuan pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Tanpa adanya sistem diferensiasi yang terencana, pendidikan dasar berisiko melakukan penyeragaman yang justru berpotensi mematikan bakat unik yang dimiliki setiap anak (Faiz et al., 2022).

Lebih jauh lagi, personalisasi pendidikan bukan sekadar persoalan teknis di dalam kelas, melainkan sebuah manifestasi dari keadilan sosial dalam pendidikan. Kita harus menyadari bahwa setiap murid memiliki "pintu masuk" dan kecepatan

berpikir yang tidak seragam. Memaksakan kurikulum tunggal bagi semua anak (*one-size-fits-all*) sama saja dengan meminggirkan siswa yang memiliki kebutuhan belajar berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem di tingkat sekolah yang mampu mengenali kekuatan setiap anak secara menyeluruh agar potensi mereka dapat terakselerasi secara maksimal tanpa terkecuali (Munir et al., 2021).

Secara konseptual, KOSP seharusnya berfungsi sebagai "kompas" yang memastikan seluruh kegiatan di sekolah berjalan di atas prinsip pembelajaran yang bermakna. Dokumen ini idealnya menjadi instrumen manajerial yang mengunci praktik diferensiasi agar menjadi prosedur standar operasional di sekolah. Dengan menyisipkan strategi ini secara strategis ke dalam KOSP, personalisasi pendidikan tidak lagi bergantung pada semangat individu guru semata, melainkan menjadi kebijakan sekolah yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Di sini, peran kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional sangat vital untuk memastikan bahwa visi diferensiasi tersebut terinternalisasi dalam budaya kerja sekolah, bukan

sekadar menjadi jargon dalam rapat tahunan (Prasetyo & Inawati, 2023).

Keberlanjutan integrasi ini juga sangat bergantung pada mekanisme evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara berkala. KOSP yang ideal tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis dan responsif terhadap data perkembangan belajar siswa di lapangan. Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang erat dalam komunitas praktisi di sekolah, di mana guru-guru dapat saling berbagi praktik baik mengenai pemetaan kebutuhan siswa secara kolektif. Tanpa adanya wadah kolaboratif yang diatur secara resmi dalam struktur manajerial sekolah, strategi berdiferensiasi hanya akan menjadi beban kerja tambahan bagi guru, bukannya sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas instruksional secara menyeluruh.

Namun, realitas di lapangan saat ini menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan selama beberapa tahun, disparitas kualitas pembelajaran antar satuan pendidikan masih menjadi tantangan yang nyata. Situasi ini menuntut sekolah untuk melakukan adaptasi kurikulum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

lebih substantif guna mengejar ketertinggalan kompetensi siswa di era percepatan digital. Ironisnya, dalam fase pemantapan kurikulum ini, proses penyusunan dokumen di tingkat sekolah sering kali masih terjebak pada formalitas administratif. Banyak sekolah yang sekadar melakukan pembaharuan rutin pada dokumen KOSP tanpa melakukan refleksi mendalam terhadap efektivitas strategi diferensiasi yang telah dijalankan, sehingga muatan personalisasi pendidikan seringkali terabaikan dan hanya menjadi pelengkap administratif semata (Suryaman, 2022).

Titik krusial yang ditemukan dalam kajian ini adalah adanya hambatan pada level manajerial: dokumen KOSP di sekolah dasar umumnya belum mampu menerjemahkan konsep ideal diferensiasi ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret. Ketidakjelasan panduan ini membuat guru di kelas sering kali berjalan tanpa arah dan standar kualitas yang baku. Akibatnya, upaya memanusiakan pembelajaran sering kali terhenti sebagai wacana administratif semata tanpa dampak nyata bagi siswa (Maulida, 2023). Guna memotret

fenomena tersebut secara empiris, kajian ini mengambil lokus penelitian pada SD Negeri 2 Culik, yang berlokasi di Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Sebagai simpulan dari problematika tersebut, integrasi strategi diferensiasi ke dalam KOSP merupakan transformasi substantif yang mendesak untuk menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh murid. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan menghambat pembentukan Profil Pelajar Pancasila secara utuh. Atas dasar itulah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis bentuk integrasi strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam dokumen KOSP pada jenjang sekolah dasar; (2) mengevaluasi sejauh mana integrasi strategis tersebut mampu mendukung upaya personalisasi pendidikan bagi siswa; serta (3) mengidentifikasi kendala dan solusi dalam mensinkronkan kebijakan personalisasi pendidikan ke dalam struktur manajerial KOSP. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan tercipta ekosistem belajar yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa (*student well-being*),

tetapi juga mengakselerasi capaian kompetensi dasar secara bermakna.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk mengupas tuntas fenomena integrasi strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kerangka manajerial KOSP. Fokus utamanya adalah menghasilkan narasi komprehensif tentang bagaimana kebijakan personalisasi pendidikan diwujudkan secara nyata dalam struktur operasional sekolah. Data dihimpun melalui sumber primer berupa wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru, serta sumber sekunder melalui studi dokumentasi KOSP dan modul ajar. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi guna menyinkronkan testimoni informan dengan bukti fisik dokumentasi sekolah sesuai prinsip kredibilitas data kualitatif terbaru (Sugiyono & Lestari, 2021).

Proses pengolahan data merujuk pada alur sistematis analisis interaktif yang diadaptasi dari model Miles, Huberman, dan Saldaña (dalam Hermawan, 2023). Tahapan dimulai dari pengumpulan data mentah, diikuti dengan reduksi data guna memeras

informasi yang relevan dengan fokus personalisasi pendidikan. Selanjutnya, temuan disajikan dalam pola deskriptif yang logis hingga akhirnya ditarik sebuah simpulan berupa proposisi akhir mengenai efektivitas sinkronisasi strategi tersebut. Seluruh rangkaian metodologis ini ditujukan untuk membedah bentuk integrasi dokumen sekaligus merumuskan solusi atas kendala manajerial yang muncul di tingkat satuan pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis dokumen KOSP menunjukkan bahwa integrasi strategi berdiferensiasi saat ini masih bersifat tekstual-makro. Meskipun terminologi tersebut telah tercantum secara legal dalam visi, misi, dan prinsip pembelajaran, rincian operasional mengenai pemetaan kebutuhan siswa serta panduan teknis bagi guru belum tersedia secara eksplisit dalam dokumen operasional sekolah. Informan G1 mengonfirmasi bahwa penyusunan dokumen selama ini masih sangat bergantung pada templat standar pemerintah demi memenuhi kepatuhan administratif birokrasi, sehingga aspek kontekstualisasi kurikulum di tingkat

satuan pendidikan belum tergarap secara mendalam.

Pada level instruksional, data wawancara mengungkap bahwa KOSP belum berfungsi sebagai instrumen pendukung utama bagi personalisasi pendidikan. Informan G1 dan G2 mengaku bahwa praktik personalisasi belajar, seperti diferensiasi proses dan produk, lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif mandiri untuk merespons dinamika kelas tanpa adanya payung hukum yang kuat dalam dokumen sekolah. G1 menegaskan bahwa ketiadaan standar evaluasi yang baku di dalam KOSP menciptakan keraguan administratif bagi guru, terutama saat harus mempertanggungjawabkan variasi penilaian siswa di hadapan wali murid karena prosedur evaluasi yang dilakukan berbeda dari standar umum.

Terakhir, ditemukan adanya dinamika kendala manajerial yang meliputi hambatan birokrasi, keterbatasan waktu untuk asesmen diagnostik, serta pola komunikasi yang masih bersifat satu arah antara tim pengembang kurikulum dan guru kelas. Sebagai langkah sinkronisasi, informan G2 memaparkan bahwa sekolah mulai mengaktifkan

komunitas belajar internal sebagai wadah pertukaran data profil siswa secara berkala. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan penyusunan KOSP di masa mendatang tidak lagi sekadar menjadi formalitas tahunan, melainkan bertransformasi menjadi instrumen manajerial yang berbasis data riil lapangan dan responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik.

1. Analisis Kedalaman Integrasi Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Dokumen KOSP

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa integrasi strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam dokumen KOSP mengalami fenomena "*decoupling*", yaitu adanya diskoneksi antara kebijakan yang tertulis secara formal dengan prosedur operasional di lapangan. Bentuk integrasi yang ditemukan saat ini masih bersifat tekstual-makro, di mana narasi mengenai keberagaman siswa hanya muncul sebagai jargon dalam visi dan misi sekolah tanpa disertai oleh instrumen turunan seperti pemetaan profil belajar, rubrik penilaian fleksibel, atau alur tujuan pembelajaran (ATP) yang adaptif.

Dominasi penggunaan templat standar dari pemerintah dalam penyusunan KOSP mengindikasikan bahwa manajemen sekolah masih berada pada fase "kepatuhan simbolik". Sekolah cenderung memprioritaskan validitas administratif agar terlihat selaras dengan regulasi Kurikulum Merdeka di mata birokrasi, namun secara tidak langsung mengabaikan kebutuhan substantif guru akan panduan teknis yang aplikatif.

Lebih jauh lagi, ketiadaan rincian teknis dalam KOSP ini menciptakan kekosongan standar operasional bagi para pendidik di tingkat satuan pendidikan. Tanpa adanya sinkronisasi yang tajam antara kebijakan pusat dan dokumen operasional sekolah, strategi berdiferensiasi hanya akan menjadi beban narasi tambahan bagi guru tanpa memberikan kemudahan instruksional yang nyata. Hal ini sejalan dengan argumen Pratama *et al.* (2023) yang menekankan bahwa kurikulum yang hanya berhenti pada tataran dokumen formal tanpa kontekstualisasi yang mendalam akan gagal merespons heterogenitas siswa di sekolah dasar secara efektif. Oleh karena itu, integrasi yang ideal dalam

KOSP seharusnya tidak sekadar mengadopsi istilah regulasi secara mentah, melainkan harus mampu mentransformasi data hasil asesmen diagnostik siswa menjadi strategi manajerial yang tertuang secara eksplisit dalam lampiran kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan secara konsisten.

2. Evaluasi Efektivitas Dukungan KOSP terhadap Upaya Personalisasi Pendidikan

Analisis terhadap data lapangan menunjukkan bahwa dukungan KOSP terhadap upaya personalisasi pendidikan masih berada pada tataran "dukungan pasif". Hal ini berarti, meskipun secara naratif sekolah mendukung keberagaman siswa, namun secara administratif kurikulum operasional sekolah belum mampu memberikan proteksi legal bagi guru untuk melakukan inovasi instruksional yang berorientasi pada kebutuhan individu. Kesenjangan ini memicu terjadinya dilema profesional yang cukup berat bagi guru kelas (G1 dan G2); di satu sisi mereka dituntut untuk melayani keunikan siswa sesuai spirit Kurikulum Merdeka, namun di sisi lain mereka terbentur pada standar evaluasi dan pelaporan yang masih

bersifat kaku dan seragam di dalam dokumen KOSP. Akibatnya, praktik personalisasi belajar sering kali dilakukan secara sporadis dan tidak terlembaga. Guru merasa cemas bahwa variasi metode atau modifikasi penilaian yang mereka lakukan akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar administratif yang telah ditetapkan dalam dokumen formal sekolah.

Ketiadaan sinkronisasi antara niat personalisasi dan ketersediaan regulasi di tingkat satuan pendidikan ini mencerminkan bahwa manajemen kurikulum belum sepenuhnya bertransformasi menjadi sistem yang adaptif. Tanpa adanya payung hukum yang eksplisit dalam KOSP mengenai fleksibilitas kurikulum, guru akan terus terjebak dalam beban moral untuk menuntaskan materi secara seragam demi mengejar target administratif. Fenomena ini diperkuat oleh kajian Hidayat et al. (2024) yang menegaskan bahwa personalisasi pendidikan memerlukan otonomi guru yang tinggi yang harus difasilitasi melalui restrukturisasi kurikulum sekolah agar relevan dengan kebutuhan siswa. Jika KOSP tidak segera direvisi untuk memberikan ruang bagi "jalur belajar jamak"

(multiple learning pathways), maka upaya memanusiakan pendidikan akan tetap menjadi retorika tanpa dukungan sistem manajerial yang kokoh, yang pada akhirnya justru menghambat pencapaian esensi Merdeka Belajar di sekolah dasar.

3. Dinamika Kendala dan Strategi Sinkronisasi Kebijakan Personalisasi Pendidikan

Pembahasan mengenai kendala sinkronisasi mengungkap bahwa hambatan utama dalam implementasi personalisasi pendidikan bukan terletak pada resistensi guru terhadap perubahan, melainkan pada rendahnya koherensi manajerial dalam penyusunan kurikulum. Temuan di lapangan mengenai dominasi komunikasi satu arah dari tim pengembang kurikulum menunjukkan adanya ego sektoral administratif yang menghambat penyerapan data riil dari kelas ke dalam dokumen KOSP. Hal ini menciptakan kondisi di mana niat baik mengenai personalisasi pendidikan dari pemerintah pusat sering kali terdistorsi di tingkat sekolah, sehingga tereduksi menjadi sekadar tumpukan berkas administratif yang tidak memiliki korelasi langsung dengan

kebutuhan harian guru maupun karakteristik unik peserta didik di sekolah dasar.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, pengaktifan Komunitas Praktisi (*Community of Practice*) di lingkungan internal sekolah menjadi solusi yang sangat krusial untuk menjembatani jurang kebijakan tersebut. Sinkronisasi kurikulum tidak boleh lagi dipandang sebagai tugas administratif kepala sekolah semata, melainkan sebuah proses kolektif untuk melakukan refleksi kebijakan secara berkala. Hal ini selaras dengan pemikiran Maulida (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam menciptakan ruang dialogis yang menjadikan data hasil asesmen diagnostik siswa sebagai basis utama revisi KOSP secara berkelanjutan. Dengan mereposisi peran guru dari sekadar "pelaksana teknis" menjadi "penyusun bersama" kurikulum, kendala keterbatasan waktu dan hambatan birokrasi dapat dimitigasi melalui pembagian peran yang kolaboratif, sehingga KOSP benar-benar bertransformasi menjadi

panduan operasional yang responsif dan kontekstual.

Pada akhirnya, integrasi strategi berdiferensiasi dalam KOSP memerlukan sinergi antara kesiapan guru dan kebijakan manajerial yang mendukung. Apabila dokumen KOSP hanya disusun untuk memenuhi tuntutan administratif, maka potensi otonomi guru dalam menciptakan pembelajaran yang personal bagi siswa akan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, sekolah perlu mereposisi KOSP bukan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen operasional yang adaptif. Hal ini penting agar guru memiliki kepastian dan dukungan manajerial yang nyata dalam melakukan inovasi instruksional demi memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.

D. Kesimpulan

Upaya sinkronisasi strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam dokumen KOSP di sekolah dasar saat ini masih terjebak pada fenomena decoupling. Secara struktural, integrasi yang dilakukan baru bersifat tekstual-makro, di mana regulasi mengenai personalisasi pendidikan

hanya hadir sebagai formalitas kebijakan demi memenuhi validitas administratif birokrasi, namun belum mampu menyentuh aspek teknis operasional yang dibutuhkan di ruang kelas. Akibatnya, kurikulum sekolah baru memberikan dukungan pasif yang belum cukup kuat untuk memproteksi inovasi instruksional guru secara legal, sehingga praktik personalisasi belajar masih berjalan secara sporadis dan tidak terlembaga.

Hambatan utama yang ditemukan di lapangan berakar pada rendahnya koherensi manajerial serta pola komunikasi yang masih bersifat satu arah antara tim pengembang kurikulum dan praktisi di kelas. Sebagai langkah solutif, sinkronisasi kebijakan hanya dapat terwujud secara substantif melalui pengaktifan Komunitas Praktisi (Community of Practice) sebagai wadah kolaborasi berkala. Dengan mereposisi peran guru dari sekadar pelaksana teknis menjadi penyusun bersama kurikulum berbasis data riil siswa, KOSP dapat bertransformasi dari sekadar artefak administratif menjadi instrumen manajerial yang hidup, adaptif, dan benar-benar responsif terhadap keberagaman peserta didik di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, A., Pratama, A., & Kurniawanti, E. (2022). Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 20-30.
- Hermawan, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Model Miles, Huberman, dan Saldaña*. Makasar: Pustaka Akademika.
- Hidayat, A., Nurlaela, L., & Kurniawan D. (2024). Otonomi guru dalam implementasi kurikulum merdeka: Analisis restrukturisasi manajerial di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 8(1), 15–28.
- Maulida, R. (2023). Peran komunitas praktisi dalam sinkronisasi kebijakan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP). *Jurnal Edumanic*, 7(2), 112–125.
- Munir, A., Fadlullah, M., & Mansur, M. (2021). Personalisasi pendidikan: Manifestasi keadilan sosial dalam sistem pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(2), 145-158.
- Prasetyo, T., & Inawati, I. (2023). Kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam internalisasi budaya diferensiasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45-56.
- Pratama, R., Saputra, M., & Sari, I. (2023). Dekonstruksi kurikulum: Fenomena decoupling antara dokumen formal dan praktik pembelajaran berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2410–2422.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaman, M. (2022). Formalitas administratif dalam penyusunan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 10(3), 88-102.
- Wulandari, S., & Surani, D. (2023). Implementasi kurikulum merdeka: Tantangan penyusunan KOSP di sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(1), 34-47.